

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Efrida Ita¹⁾

¹⁾STKIP Citra Bakti

evoletelvo@gmail.com

Abstrak

Pendidikan bermutu merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan sumber daya manusia yang bermutu. Di Indonesia mutu pendidikan masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah manajemen pendidikan yang tersentralisasi. Manajemen tersebut membuat sekolah-sekolah, baik di jenjang menengah maupun jenjang pendidikan dasar menjadi tidak mandiri dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Pola manajemen pendidikan baru perlu diimplementasikan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan anak usia dini yaitu melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah perlu dilaksanakan karena sekolah lebih mengetahui tentang kebutuhan lembaganya dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolahnya. Dengan penerapan manajemen berbasis sekolah dapat berdampak positif yakni meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Dengan manajemen berbasis sekolah, kelincuhan dalam pengelolaan sekolah akan terjadi dan diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien yang nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Karena semakin baik mutu pendidikan, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

Kata Kunci: manajemen berbasis sekolah, mutu, pendidikan anak usia dini

Abstract

The quality of education is the key for all of the progress and development relating to the quality of human resources. The educational quality is still poor in Indonesia. One of the reasons is because of the centralization on the educational management. The kind of the management making the schools become dependent in managing the provided resources, both for the secondary level and basic level. The system of the new educational management needs to be implemented to improve the quality of the early childhood education namely through School Based Management (SBM). School based management needs to be implemented because the schools know more about their needs and their strengths, weaknesses, opportunities, and threateness. By implementing school based management can have a positive impact, viz to improve the educational quality through the school autonomy and initiative. With school based management, the liveliness in managing the schools will happen and to be expected in supporting the learning process effectively and efficiently in order to improve the educational quality. Because the better the quality of education, the better the quality of human resources produced.

Keywords: school based management, quality, early childhood education

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Dalam pengembangan SDM tersebut, terdapat berbagai faktor yang sangat berpengaruh. Salah satu di antara faktor tersebut adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara didapatkan. Maju mundurnya sebuah negara ditentukan oleh mutu pendidikan. Karena dengan pendidikan yang bermutu pasti akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya.

Pendidikan yang bermutu merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan sumber daya manusia yang bermutu. Sumber daya manusia yang bermutu adalah sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global. Suatu era berbasis digital yang memerlukan SDM yang mumpuni untuk menjalankan era tersebut dalam hal penguatan akademik, kompetensi dan karakter. Untuk menghasilkannya, mutu pendidikan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan karena melalui pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya, baik sebagai pribadi maupun warga masyarakat.

Pendidikan tidak hanya menyangkut kehidupan di masa yang akan datang, akan tetapi pendidikan juga menyangkut kondisi dan situasi saat ini. Sekolah sebagai institusi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan derajat sosial masyarakat. Kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan

masyarakat. Oleh karena itu, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan manajemen. Sekolah memerlukan manajemen yang akurat agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu jenjang pendidikan dasar yang dapat membantu pengembangan SDM menjadi lebih optimal adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

PAUD semakin dirasakan kepentingannya sebagai upaya yang terencana dan terukur untuk membantu tumbuh kembang anak. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, masyarakat sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai untuk putra-putrinya, terlebih pada saat mereka masih berada dalam tataran usia dini (Efrida Ita, 2018: 45). Hal ini menjadi pemicu maraknya penyelenggaraan PAUD sampai ke pedesaan dan merupakan pertanda yang sangat baik bagi dunia pendidikan. Artinya, pemerintah dan masyarakat telah sadar betapa pentingnya PAUD yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga PAUD. Namun, penyelenggaraan PAUD tersebut kurang diimbangi dengan mutu layanan lembaga PAUD yang berkaitan erat dengan manajemen lembaga PAUD itu sendiri.

Berbagai problematika yang terjadi di lapangan sebagai penyebab rendahnya mutu layanan PAUD, antara lain rendahnya penerimaan orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD, kualifikasi pendidik PAUD yang tidak sesuai dengan standar minimal, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, orang tua yang kurang mendorong anak menjadi pembelajar, pembiayaan penyelenggaraan PAUD yang minim hingga berdampak pada rendahnya mutu layanan PAUD. Masalah-masalah tersebut berkaitan erat dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, manajemen PAUD diperlukan untuk diterapkan agar berdampak pada peningkatan kualitas layanan lembaga PAUD.

Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis. Pola baru manajemen ini disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana pada pola baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. MBS merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan sekolah. MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik.

MBS dapat diartikan sebagai model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat yang dilayani (Bedjo Sujanto, 2007: 30). Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa dengan

MBS diharapkan dapat membuat sekolah lebih mandiri dengan memberdayakan potensi sekolah melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada sekolah (otonomi). Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolahnya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Selain itu, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat pula.

MBS sebagai terjemahan dari *School Based Management* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberi kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. MBS sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan sekolah dan merupakan salah satu strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual (Nurkolis, 2006: 3).

Manajemen berbasis sekolah atau istilah lain desentralisasi pendidikan merupakan pemberian keleluasaan daerah untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. Kewenangan dan kekuasaan serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan diserahkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota sehingga timbul variasi pengelolaan antara daerah kabupaten/kota yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya: kemampuan sumber daya manusia di

daerah, kekayaan sumber daya alam daerah, pendapatan daerah dari berbagai sektor, kepadatan penduduk, dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (Oding Supriadi, 2014: 49).

MBS memberi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan. Dengan keterlibatan tersebut dapat meningkatkan lingkungan belajar yang efektif bagi anak usia dini. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. Alasan ini cukup rasional karena lingkungan sekolahlah yang paling mengetahui bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa dan diyakini dengan adanya lingkungan belajar yang efektif, maka prestasi belajar siswa, baik berupa prestasi akademik maupun nonakademik akan meningkat.

KAJIAN PUSTAKA

Mutu pendidikan di Indonesia menjadi isu sentral dalam pendidikan nasional terutama berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, termasuk di dalamnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk pula pada jenjang PAUD. Dalam pencapaian tujuan pendidikan bagi setiap lembaga pendidikan, mutu atau kualitas layanan pendidikan menjadi fokus utama yang juga berdampak pada kualitas lulusan dari lembaga tersebut. Mutu pendidikan yang diinginkan tidak akan terjadi begitu saja. Mutu yang diinginkan tersebut harus direncanakan. Mutu perlu menjadi sebuah bagian penting dalam strategi sebuah institusi dan untuk meraihnya wajib

menggunakan proses perencanaan yang matang.

Proses perencanaan yang matang dijalankan melalui suatu proses manajemen yang akurat. Salah satu model manajemen yang dapat meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata pengelolaan sekolah yang baik adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi, memberikan keluwesan atau fleksibilitas kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku (Rohiat, 2010: 47). Dengan otonomi tersebut, sekolah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau *stakeholder* yang ada.

Sosialisasi ide dan pemahaman tentang MBS pada saat ini merupakan momentum yang sangat tepat. Reformasi manajemen persekolahan termasuk dalam pendidikan anak usia dini dengan menggunakan model manajemen berbasis sekolah merupakan tuntutan yang mendesak. Saat ini sekolah ditempatkan pada posisi yang kurang berdaya karena hampir semua operasional kegiatan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh birokrasi di atasnya. Dengan adanya MBS sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, mengelola, membiayai, dan

menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya. Dengan MBS, sekolah juga dapat memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia dan dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah dan warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penerapan MBS untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Selain itu, sekolah dapat bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan masing-masing sekolah yang disampaikan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat, sehingga sekolah akan berusaha keras untuk mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan (Bedjo Sujanto, 2007: 32). Oleh karena itu, sekolah dapat bersaing secara sehat dengan sekolah-sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, masyarakat dan pemda setempat.

Fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah (Bedjo Sujanto, 2007: 36-37) meliputi:

1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah

Sekolah dapat menyusun rencana dan programnya sendiri (*school based plan*), dan juga melakukan evaluasi internal terhadap program-program yang dilaksanakan untuk melihat tingkat keberhasilannya.

2) Pengelolaan kurikulum

Dengan MBS kurikulum nasional dapat diperdalam dan dikembangkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan daerah. Kurikulum

muatan lokal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat dan disepakati bersama. Kualitas standar minimal nasional harus dapat dicapai oleh tiap sekolah.

3) Pengelolaan proses belajar mengajar

Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif yang terfokus pada siswa (*student centered*) sesuai dengan keadaan riil masyarakat.

4) Pengelolaan ketenagaan

Sejak analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hubungan kerja, evaluasi kinerja dan pemberian *reward* ataupun sanksi dilakukan oleh sekolah bersama masyarakat. Kecuali penggajian dan pemberian insentif kepada guru/staf yang berstatus PNS dilakukan oleh pemerintah. Birokrasi di atasnya hanya bertindak sebagai fasilitator.

5) Pengelolaan peralatan dan perlengkapan

Sejak dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan, dilakukan oleh sekolah, karena sekolah yang paling mengetahui. Pendanaan untuk pengadaan dapat *sharing* antara pemerintah dan masyarakat.

6) Pengelolaan biaya pendidikan

Biaya pendidikan harus dikelola dengan baik, yang dimulai dari kegiatan pengalokasian biaya dan sumber daya pendidikan untuk kegiatan operasional terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar agar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Biaya pendidikan dikelola oleh para kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang

yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan biaya pendidikan tersebut.

MBS perlu dilaksanakan karena beberapa alasan (Bedjo Sujanto, 31-32):

- 1) Sekolah lebih mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolahnya, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya,
- 2) Sekolah lebih mengetahui tentang kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik,
- 3) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi sekolahnya,
- 4) Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat,
- 5) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat,
- 6) Sekolah dapat bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan masing-masing sekolah yang disampaikan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat, sehingga sekolah akan berusaha keras untuk mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan,
- 7) Sekolah dapat bersaing secara sehat dengan sekolah-sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, masyarakat dan pemda setempat,

- 8) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat.

Implementasi MBS di lembaga pendidikan anak usia dini yang dikatakan sebagai tahap pelaksanaan pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang sudah ditetapkan melalui kerja sama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan itu dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan, setidaknya-tidaknya ada tiga pihak yang memiliki peran masing-masing yang sangat penting untuk keberhasilan program lembaga yang telah direncanakan. Ketiga pihak tersebut antara lain: kepala sekolah, guru, dan staf sekolah yang lain, serta orang tua siswa atau masyarakat yang direpresentasikan sebagai komite sekolah.

1) Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh lembaga dan mengidentifikasi dan merumuskan cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Fungsi pengorganisasian, peran kepala sekolah mencakup pemberian dan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing staf, menetapkan jalur komunikasi, mekanisme kerja, melengkapi masing-masing staf dengan sarana atau alat dan sumber daya lain dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas staf, untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat oleh sekolah.

Fungsi pimpinan, pentingnya fungsi kepemimpinan ini bahkan membuat sebagian pakar berpendapat bahwa pimpinan atau kepemimpinan terpisah dari fungsi manajemen. Kepemimpinan yang kuat, yaitu kepemimpinan yang mampu mengarahkan, menggerakkan, mempengaruhi, dan memotivasi staf yang dipimpinnya sehingga para pengikutnya dengan sadar dan sukarela, bahkan dengan senang hati bersedia baik secara individual maupun secara kelompok melakukan tugas-tugas lembaga tanpa harus dipaksa atau ditakut-takuti, memiliki karakter dan kompetensi.

2) Peran Guru dan Staf Sekolah

Peran guru sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkungannya yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar, setiap guru memahami visi dan misi lembaga, merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menerapkan kepemimpinan yang demokratis, memberdayakan siswa dengan mengambil keputusan dan membina hubungan yang baik dengan para gurulain, dengan siswa, dengan kepala sekolah dan orang tua.

Ada staf lain, selain guru, yang menunjang atau mendukung di dalam pengelolaan sekolah, seperti pustakawan, penanggung jawab bengkel APE, berbagai lab., serta staf tata usaha sekolah serta pemelihara atau penjaga sekolah. Peran seluruh staf sekolah tidak peduli apa jabatannya adalah penting karena masing-masing

adalah pengambil keputusan dalam melaksanakan tugas masing-masing dan memberikan kontribusi untuk keberhasilan lembaga.

3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Peran orang tua siswa (rumah) dan masyarakat (lingkungan) sudah lama dikenal sebagai pusat-pusat pendidikan yang penting di dalam mengembangkan potensi anak. Dalam memandang kesiapan anak untuk bersekolah, secara formal pada umumnya orang menganggap bahwa pendidikan pada tingkat usia dini (kelompok bermain dan taman kanak-kanak) merupakan lembaga yang mengembangkan kesiapan untuk bersekolah. Hal ini tidak keliru, akan tetapi mengingat waktu yang dimiliki lembaga pendidikan formal yang terbatas, maka keluarga sesungguhnya mempunyai peluang lebih besar untuk membina kesiapan belajar anak.

Kondisi keluarga yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun dan menciptakan suasana yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran anak, sangat menguntungkan bagi kesiapan anak untuk melakukan tugas-tugas belajar, berupaya mengecek kemajuan anaknya, mengatur acara televisi yang sesuai, mengintensifkan komunikasi saat makan malam bersama, serta gemar membelikan buku-buku yang bermanfaat, akan mempunyai peluang kemajuan anak dan sangat berpengaruh pada prestasi anak di sekolah.

Evaluasi sebagai salah satu tahap penting dalam MBS perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang dicapai oleh lembaga dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi pada tahap ini

merupakan evaluasi menyeluruh menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana, pelayanan untuk anak, hubungan sekolah dan masyarakat serta administrasi ketatalaksanaan lembaga sekolah.

Penerapan MBS berdampak positif antara lain: 1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, 2) meningkatkan kepedulian dan kesadaran warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan/sekolah melalui pengambilan keputusan bersama, 3) meningkatkan tanggung jawab pendidikan kepada orang tua, masyarakat, pemerintah/sekolah terutama dalam peningkatan mutu, 3) meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk membangun mutu yang lebih baik (Bedjo Sujanto, 2007: 31).

Melalui MBS, sekolah efektif dapat dikembangkan secara mandiri karena sekolah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar (otonomi) untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dengan MBS, kelincahan dalam pengelolaan sekolah akan terjadi dan diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien yang nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Karena semakin baik mutu pendidikan, semakin baik pula kualitas SDM yang dihasilkan.

SIMPULAN

MBS memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Sekolah, dalam hal ini lembaga PAUD memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Sekolah akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal.

Pendelegasian otoritas adalah suatu hal fundamental di dalam MBS. Dengan partisipasi atau pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan sekolah, rasa memiliki terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab. Peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah. Hal inilah yang menjadi esensi partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pendidikan yang dapat berdampak secara langsung dalam peningkatan mutu lembaga.

Manajemen berbasis sekolah perlu diterapkan di lembaga pendidikan anak usia dini sehingga dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan lembaga. Karena melalui penerapan MBS, maka sekolah dalam penentuan dan pengambilan kebijakan lebih melibatkan seluruh pelanggan sekolah sehingga pengambilan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

DAFTAR PUSTAKA

- Bedjo Sujanto. 2007. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi Daerah*. CV Sagung Seto: Jakarta.
- Efrida Ita. 2018. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Di TK Rutosoro Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Vol 6 No1: Halaman 45-52. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/index>
- Nurkolis. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Grasindo: Jakarta.
- Oding Supriadi. 2014. Efektivitas Desentralisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, Vol.11 No. 1: Halaman 41-50.
- Rohiat.2010. *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.